

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih, meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital ataupun modal maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan (Todaro, 2000 dalam Astuti, dkk (2019)).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan agar lebih merata. Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dilihat dari aspek ekonomi maupun social. Salah satu sasaran pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak banyaknya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap dalam kegiatan ekonomi (Rimbawan, 2010).

Tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan seperti pengangguran.

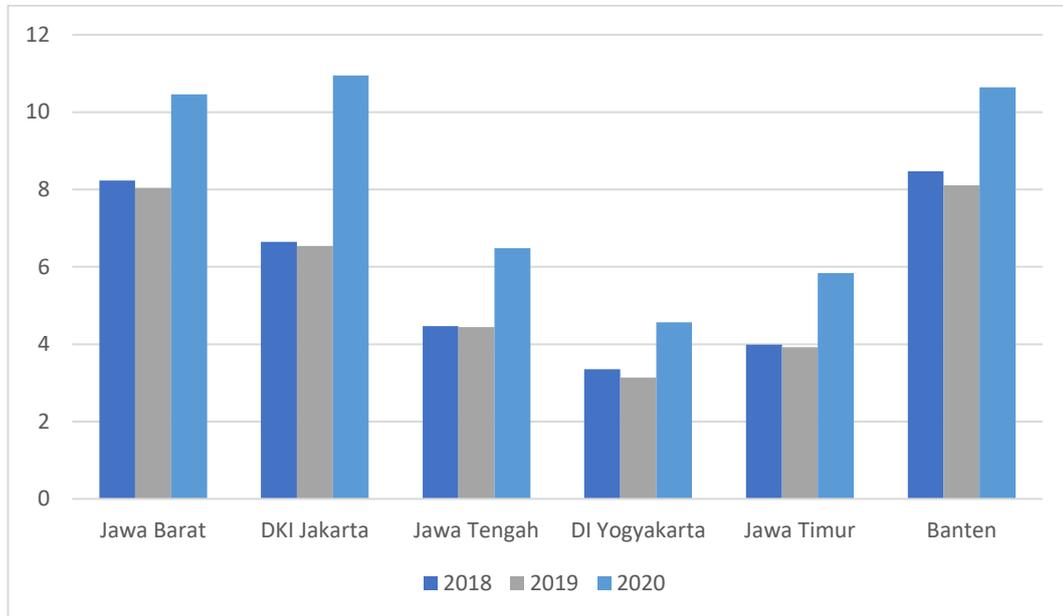
Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan.

Pengangguran seringkali menjadi permasalahan dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (Naf'an, 2014 dalam Helvira dan Rizki (2020)). Pengangguran didefinisikan sebagai seorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004:). Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk, baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Pengangguran merupakan masalah setiap negara, bahkan negara maju terlebih lagi di negara berkembang seperti negara Indonesia. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang tidak dapat mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu (Sri Budhi, 2008: 82).

Masalah pengangguran sangat penting untuk diperhatikan karena pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Cang dan Wu, 2012: 4 dalam Sirait, 2013: 110).

Adapun dampak yang diakibatkan oleh pengangguran begitu besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi, oleh karena itu merupakan tugas penting pemerintah

daerah untuk segera melakukan usaha dan kebijakan terkait dengan penanganan masalah pengangguran, terutama di Provinsi Jawa Barat.

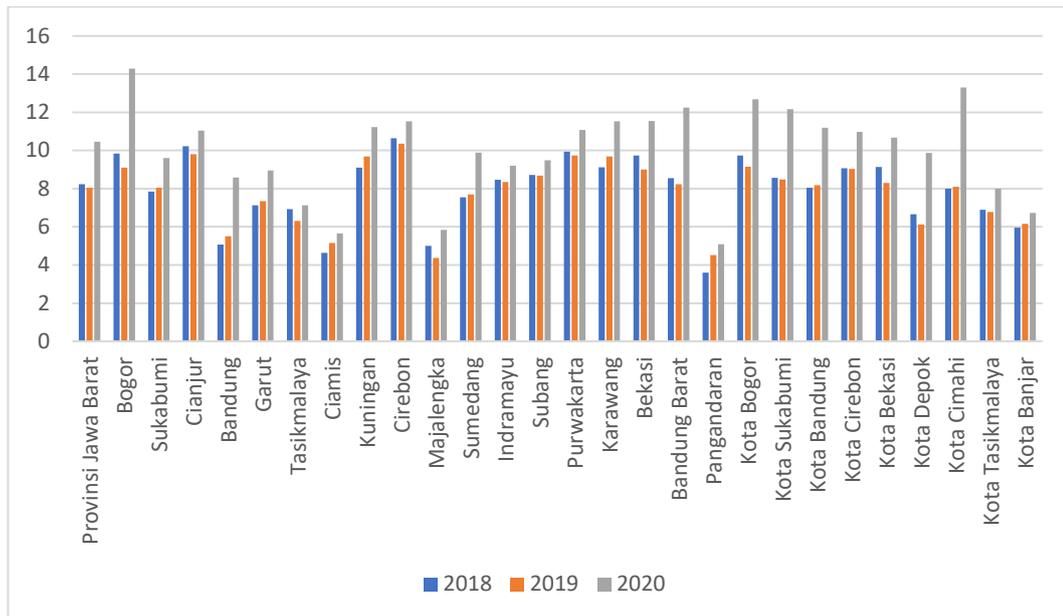


Gambar 1. 1 Presentase Tingkat Pengangguran di Enam Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2020

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Provinsi (Persen) 2018-2020

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, jumlah pengangguran yang terjadi di 6 Pulau Jawa dari tahun 2018-2020 menunjukkan angka yang naik turun dari masing masing provinsi. Provinsi Jawa Barat, provinsi yang tertinggi kedua setelah Provinsi Banten. Namun pada tahun 2020, 6 Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan angka yang sangat naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 10,46%, karena di tahun 2020 adanya virus Panedemi *Covid-19* yang mulai memasuki di Indonesia pada awal tahun 2020. Dimana dampaknya sangat berpengaruh pada ketenagakerjaan dan beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan serta terjadinya PHK.



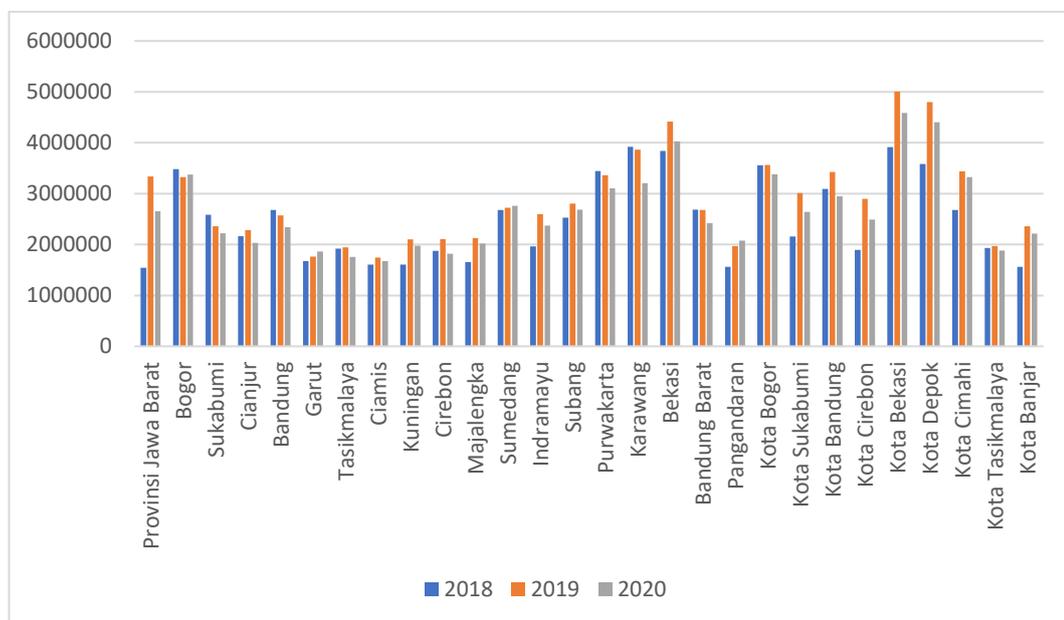
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen)2018-2020

Dilihat dari gambar 1.2 jumlah tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dirata-ratakan setiap tahunnya mengalami kenaikan mulai dari tahun 2018 tingkat pengangguran sebesar 8.23%, tahun 2019 sebesar 8.04%, dan tahun 2020 sebesar 10.46%. Di tahun 2020 semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kenaikan angka yang sangat drastis, Kabupaten Bogor menunjukkan angka yang tertinggi sebesar 14,29% tahun 2020. Pada tahun 2020 dimana telah di cantumkan pada keterangan gambar 1.1 yaitu, adanya virus Pandemi *Covid-19* yang mulai memasuki Indonesia pada tahun 2020. Dampaknya ini semua kegiatan apapun terhenti oleh virus *Covid-19* karena virus ini mudah menular dengan cepat, dan virus ini menginfeksi sistem pernapasan dan banyak korban meninggal akibat virus *Covid-19* ini. Dampaknya sangat berpengaruh pada

ketenagakerjaan dan terjadinya PHK, akibat perusahaan mengalami kebangkrutan tidak bisa berkegiatan dan memproduksi karena virus tersebut.

Adapun dampak yang diakibatkan oleh pengangguran begitu besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi, oleh karena itu merupakan tugas penting pemerintah daerah untuk segera melakukan usaha dan kebijakan terkait dengan penanganan masalah pengangguran, terutama di Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan.

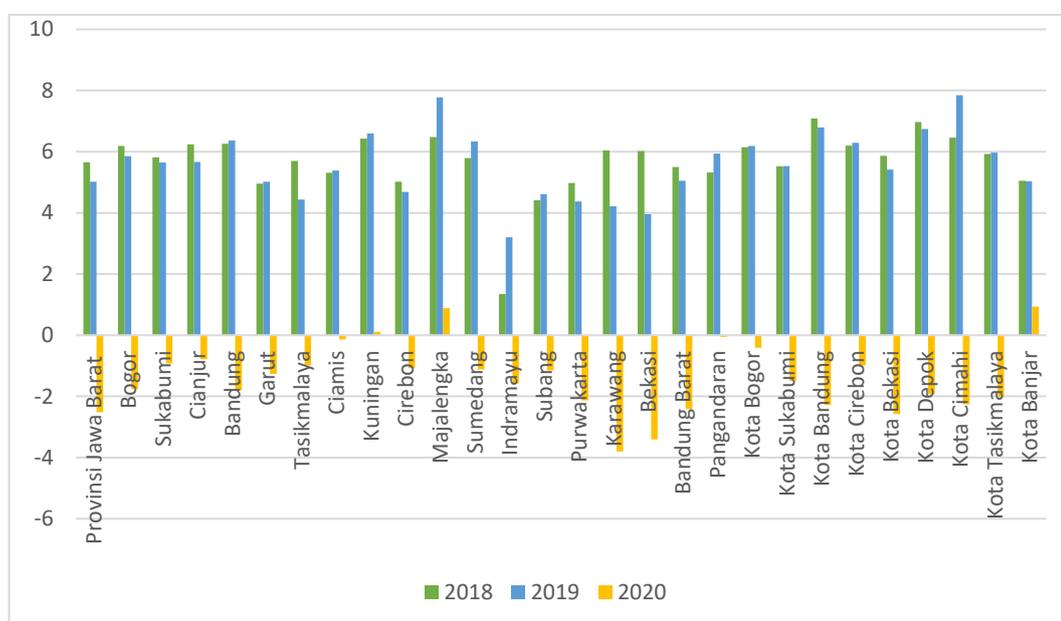


Gambar 1. 3 Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2018-2020

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi naik turun peningkatan upah minimum dirata-ratakan upah minimum Provinsi Jawa Barat yaitu, Rp 1.544.360 pada tahun 2018, Rp 1.668.372 pada tahun 2019, dan Rp 1.810.351 pada tahun 2020. Upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tertinggi yaitu tahun 2019 di Kota Bekasi sebesar Rp 5.003.151. Upah mempengaruhi terhadap jumlah

angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi dan akan mencari tenaga kerja yang terdidik dan lebih berpengalaman (N. Gregory Mankiw, Op. Cit, h. 205.) Sementara itu pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi (LPE).



Gambar 1. 4 Presentatse Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

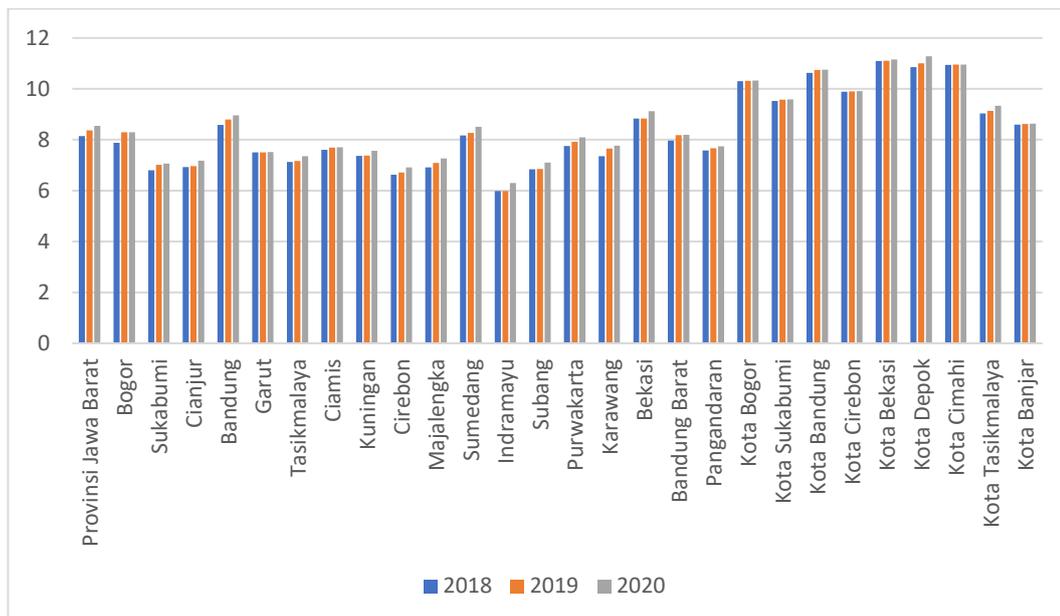
Sumber: BPS, Laju PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2018-2020 Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan gambar 1.4 diatas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan hampir di setiap daerah, Dirata-ratakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,65%, tahun 2019 sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 mangalami penurunan yang sangat drastis menunjukkan angka minus sebesar -2,52%. Hal ini disebabkan karena adanya

pandemi virus *Covid-19* yang mulai memasuki Indonesia pada awal tahun 2020, dimana semua aktivitas terhenti dan menjadi tidak efektif, semua aktivitas dibatasi dan bekerja dirumah (*Work From Home*) karena untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19*. Oleh sebab itu aktivitas produksi barang dan jasa terhenti dan tidak efektif yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka produksi barang produksi barang dan jasa juga meningkat sehingga akan tercapainya kesempatan kerja guna memanfaatkan angkatan kerja dan akan mengurangi pengangguran (Mankiw. 2003: 103).

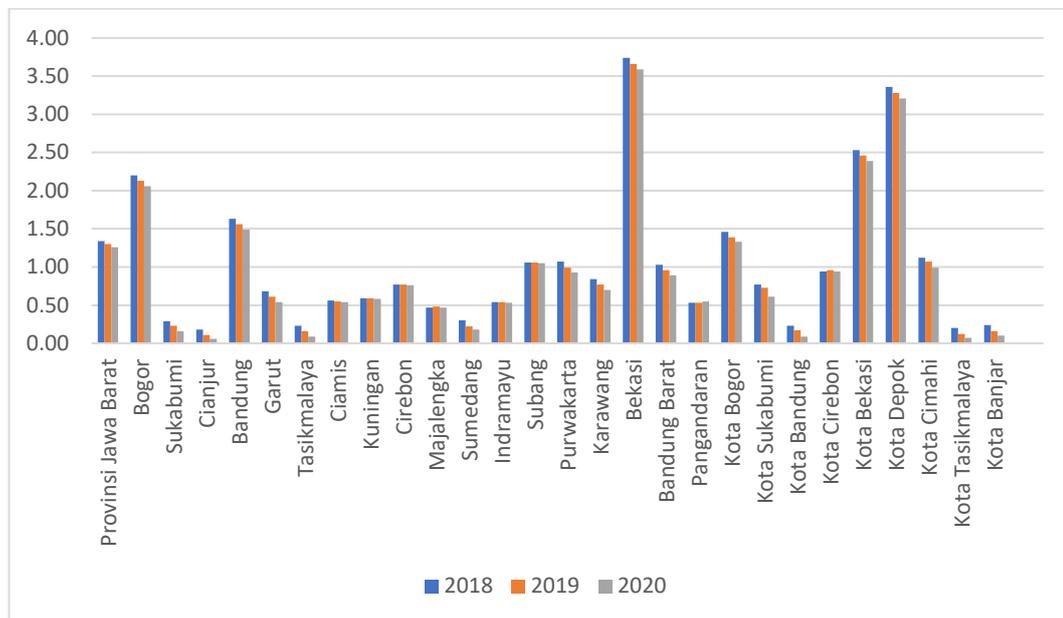
Selain upah minimum dan pertumbuhan ekonomi, faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan. Adapun hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan dapat menentukan status pekerjaan seseorang, karena dengan tingkat pendidikan yang lebih baik maka seseorang akan cenderung mendapatkan pekerjaan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup di sisi lain juga dapat mengurangi tingkat pengangguran (Elfindri 2001: 239).



Gambar 1. 5 Presentase Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber: Open Data Prov Jabar, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018-2020

Tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang diselesaikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dirata-ratakan setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 8,15%, pada tahun 2019 sebesar 8.37%, dan tahun 2020 sebesar 8,55%. Hal ini bahwa pengaruh pendidikan terhadap pengangguran sangat berpengaruh karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin luas kesempatan kerja bagi angkatan yang bersangkutan sehingga angka pengangguran menurun. Selanjutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan penduduk (LPP).



Gambar 1. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber: Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2018-2020

Dilihat dari gambar 1.6 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami penurunan. Dirata-ratakan setiap tahunnya dari tahun 2018 sebesar 1.34%, pada tahun 2019 sebesar 1.30, dan tahun 2020 sebesar 1.26%. Dari 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat angka laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Bekasi sebesar 3.59%, sedangkan yang paling rendah terjadi di Kabupaten Cianjur sebesar 0.06%.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk lewat Program Keluarga Berencana tertuang dalam Undang-Undang No 52 Tahun 2009. Namun pada tahun 2020 mungkin salah satu penyebabnya adalah Pandemi Virus *Covid-19* yang mengakibatkan banyak kematian oleh penyakit tersebut, karena virus ini mudah menular dengan cepat, dan

virus ini menginfeksi sistem pernapasan. Kelahiran dan kematian merupakan faktor utama pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dan pendidikan.

Berdasarkan fenomena di atas dan karena belum banyak yang melakukan penelitian terkait laju pertumbuhan penduduk dalam hubungan dengan tingkat pengangguran, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020”**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana kepekaan tingkat pengangguran terhadap upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepekaan tingkat pengangguran terhadap upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan pendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian khususnya mengenai pengangguran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gambaran tentang pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, laju pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, dan sebagai acuan untuk membuat kebijakan mengenai masalah pengangguran ini.

